

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Oleh

Sherly Ayuna Putri; Hazar Kusmayanti; Linda Rachmainy

1. Fakultas Hukum/Universitas Padjadjaran

\*Korespondensi: sherly.ayunaputri@yahoo.com

## ABSTRACT

*In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is applied to fill up sense of justice and right among citizen who do not have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code. This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.*

**Keyword:** mobile court, practices, religious court

## I. Pendahuluan

Pengertian Pengadilan menurut bahasa adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hak sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Jadi para pihak yang merasa haknya dirugikan atau ingin mendapat perlindungan yang sama di muka hukum, jalan terakhir yang mereka lakukan adalah mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Peran pengadilan juga diatur dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Dalam prakteknya ternyata masih banyak masyarakat awam yang takut berurusan dengan hukum dan ditambah tidak mengerti persoalan hukum, pemberian kuasa kepada pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum di pengadilan menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan. Terkadang harus mengeluarkan sejumlah uang, mereka yang berpekerja mau tidak mau mencari

pengacara. Sepertinya mencari pengacara menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Kemudian masyarakat seringkali mengasumsikan berperkara di pengadilan bukan salah satu cara cepat untuk menyelesaikan perkara.

Hal tersebut sangat kontras karena seperti yang diketahui bahwa asas peradilan dalam menyelesaikan perkara salah satunya harus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas tersebut merupakan asas peradilan yang berlaku di negara Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada mulanya asas tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pada penjelasannya dijelaskan dalam angka 8 yaitu :

“ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan hukum sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini tidak hanya harus diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan ketika sampai perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti saja. Tetapi asas ini harus diterapkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata juga karena merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan proses pemeriksaan perkara perdata.

Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang rumit, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutannya untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya bukan saja pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihaknya bergantian tidak datang atau meminta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Ditentukannya biaya ringan agar ditanggung oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan para pihak enggan

untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan<sup>1</sup>.

Pengadilan yang biasanya masyarakat ketahui terbatas hanya pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan pengadilan seperti pengadilan militer, pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara dan badan peradilan lainnya seringkali tidak diketahui oleh masyarakat. Ketidaktahuan ini karena kebanyakan tuntutan hak yang diajukan diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan agama. Tuntutan hak menurut Sudikno Mertokusomo adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tuntutan hak dibagi dua yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa berupa gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yaitu permohonan.

Pengadilan memiliki dua macam wewenang mengadili yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Salah satu pengadilan yang paling banyak menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia yaitu peradilan agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun perkara-perkara tertentu yang menjadi wewenang penuh pengadilan agama dan tidak diberikan kepada pengadilan umum menurut Pasal Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syariah.

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan agama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana

masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga Pengadilan, dengan semboyan *justice for the all* (keadilan untuk semua). Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya<sup>2</sup>.

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

1. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
2. Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
3. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
4. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/ cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
5. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
6. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Dalam peraturan baru mengenai sidang keliling yaitu Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Perkawinan. Adanya Perma No.1 Tahun 2015 ini agar adanya sistem yang sulit dan berbelit-belit dapat menjadi faktor bagi pencari keadilan jengah dan enggan berurusan dengan hukum. Pasalnya, sistem yang panjang dan berbelit-belit membuka celah untuk terjadi korupsi. Untuk itu, banyak masyarakat kelompok miskin yang tidak terjangkau hukum. Melihat permasalahan ini, Peradilan Agama pun melakukan terobosan demi menjangkau kelompok miskin dan kaum marjinal yang terlilit kasus hukum keluarga. Terobosan yang dilakukan adalah sidang keliling dan memberikan layanan gratis melalui pos-pos bantuan hukum.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menurut Pasal 1 angka 1 PERMA 1/2015, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai

dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pelayanan Terpadu sidang keliling menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA 1/2015 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling<sup>14</sup> Pasal 3 ayat (2) PERMA 1/2015.

Pelayanan Terpadu sidang keliling menurut Pasal 4 PERMA 1/2015 meliputi:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4 PERMA 1/2015 mengatur Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

1. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
2. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
3. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
4. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Tidak

semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi. Salah satu pengadilan agama yang banyak menurut data pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung<sup>3</sup> menyelesaikan perkara melalui sidang keliling adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan jumlah perkara yang diselesaikan 197 perkara sampai bulan Januari 2017 ini. Kemungkinan hal ini dipicu karena angka perceraian di Tasikmalaya termasuk lima terbesar se-Jawa Barat.

### Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan sidang keliling peradiln agama dihubungkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata

### Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian  
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis<sup>4</sup> yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksana.
2. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah juga dilakukan yuridis normatif<sup>5</sup> yaitu penelitian mengenai teori, kaidah (norma) dan sistematika hukum, serta bersifat empiris karena studi lapangan
3. Tahap Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier).
- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:
  - 1). Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 2). Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR
  - 3). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
  - 4). Perma No.1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu siding keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, antara lain berasal dari jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel surat kabar, dan sebagainya.

### II. Pembahasan

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradiln umum yang telah disahkan oleh sidang pleno B.P.L.H.N.ke-13, pada tanggal 12 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi undang-undang. Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara masih berserakan, sebagian termuat dalam Het Indonesich Herziene disingkat HIR, yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rechtreglement Buitengewesten disingkat R.Bg. berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia<sup>6</sup>. Asas-asas Hukum Acara Perdata di setiap badan peradiln masih merujuk kepada HIR dan Rbg.

Asas-asas hukum acara perdata dikemukakan oleh Sudikno terbagi menjadi 7 asas yaitu diantaranya<sup>7</sup>:

1. Hakim bersifat menunggu dan Hakim Pasif  
Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 118 HIR, 142 Rbg menentukan bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradiln. Akan ada proses peradiln atau tidak, itu tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi disini para pihaklah

yang aktif. Hakim bersikap pasif dalam arti hakim menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*). Bisa dikatakan pula bahwa jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo judex sine actore*).

Dalam praktik sidang keliling terjadi kontradiksi dimana ada yang menyebutkan hakim bersikap aktif karena seolah-olah hakim mencari perkara dan hakim tidak harus menunggu perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa kepadanya, karena hakim dalam sidang keliling justru turun langsung ke lapangan untuk mengadili suatu perkara. Namun menurut penulis sebetulnya hakim hanya berpindah tempat untuk mengadili saja namun tetap yang mengajukan perkaranya adalah para pihak dan hakim hanya berpindah tempat saja dari pengadilan ke luar gedung pengadilan. Tetapi merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Berikut ini langkah-langkah Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.

- a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama;
- b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling
- c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

#### Persidangan dan Mediasi

- a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang

- b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
- c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

#### 2. Sifat Terbukanya Persidangan

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta lebih menjamin *obyektivitas* peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat (terdapat dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009)

#### 3. Mendengar kedua belah pihak

Bahwa pengadilan sidang keliling mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya (*audi et alteram partem*)

Berdasarkan penelitian lapangan asas "Harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak" telah terpenuhi dimana hakim dalam persidangan sebelumnya memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak harus mendapatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak ternyata belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, majelis hakim karena jabatannya telah memerintahkan para pihak yang sedang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum. Hakim dalam persidangan sidang keliling telah bertindak adil kepada para pihak yang sedang berperkara dan tidak membedakan serta tidak berpihak kepada salah satu pihak. Untuk

dapat tercapainya asas keadilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka hakim telah mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan cara mengadili perkara para pihak seadil-adilnya. itu, dalam selain itu memberikan keputusan hakim tidak hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak, terkecuali jika ternyata pihak tergugat setelah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir (*purge*) dan tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya serta tidak mempergunakan haknya untuk didengar keterangannya hakim dapat memberikan putusan *verstek*. Akan tetapi, setelah hakim memberikan putusan *verstek* dan ada perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat, maka hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak tergugat dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (Pasal 121 ayat (2), 132 a HIR jo. Pasal 145 ayat (2), 157 RBg. jo. Pasal 47 Rv. jo Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

#### 4. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan sidang keliling di Pengadilan agama telah memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, 618 Rbg). Alasan-alasan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Salah satu untuk menciptakan pelayanan yang baik dan keadilan untuk setiap lapisan masyarakat adalah dibentuknya Sidang Keliling di Pengadilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dibentuknya sidang keliling ini diharapkan dapat mencapai "Asas cepat sederhana dan biaya ringan" yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu

banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keenganan tau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan<sup>8</sup>

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat.

Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap "moderasi". Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergipoh-gopoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas "Audi alteram Patern"<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

- "(1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana"

Adanya Lembaga Sidang Keliling ini juga didasari ketika masyarakat Indonesia dipelosok daerah pedesaan karena faktor geografis Indonesia sulit untuk mencapai kantor pengadilan

agama yang terletak di pusat ibu kota kabupaten atau kota karena kurangnya sarana transportasi. Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan itu kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo<sup>10</sup>

Pengertian sederhana mengacu pada “complicated” penyelesaian suatu perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” mengacu pada “tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan “biaya ringan” mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya didepan peradilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

#### 1. Prinsip Cepat

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan

kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Prinsip hukum cepat dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga yang tampak dalam praktek peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama. Nampak prinsip hukum acara cepat tidak memberikan pengaruh apapun terhadap praktek peradilan perdata, terutama praktek peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat banding tidak mampu membatasi jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo, menyatakan, bahwa :<sup>11</sup>

“Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda-tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan”.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, sidang keliling perkara yang paling banyak adalah perkara perceraian dan para pihak biasanya tidak melanjutkan perkara nya itu pada tingkat Banding. Sehingga Ketidaktahuan peradilan tingkat banding sebagai sarana membatasi jumlah perkara dapat teratasi, dan prinsip cepat, dapat terwujud implementasi. Apabila ada suatu perkara yang belum selesai disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedangkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan tapi hal ini jarang sekali terjadi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tim aparaturnya sidang keliling, mereka mengacu dasar hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Dalam proses sidang keliling, Mahkamah Agung bermaksud memerintahkan ke jajaran bawahnya untuk memberikan pelayanan prima secara riil di masyarakat di masing-masing Pengadilan Agama

.”Untuk permohonan ganti nama, perubahan nama dimudahkan saja. Kami buat ini untuk tidak mempersulit orang,” kata Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga mengatakan, sesuai dengan aturan memang ada biaya yang harus dibayar bagi warga yang hendak melakukan perbaikan surat penting. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat kerja sama dengan pemerintah bahwa warga miskin yang mengajukan perbaikan surat penting biaya perkaranya nihil atau gratis. Purnomo menambahkan, nantinya warga yang hendak memperbaiki surat penting harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Namun untuk warga yang mampu harus membayar sesuai dengan ketentuan dan biaya untuk panja perkara sekitar Rp400 ribu. Ia mengatakan, kebijakan ini adalah terobosan baru. Masyarakat menjadi lebih cepat untuk mengurus perbaikan berbagai surat penting dan waktu yang diperlukan juga lebih singkat. Sesuai dengan aturan, waktu yang diperlukan adalah sekitar satu pekan, namun dengan program ini hanya sekitar lima menit.

## 2. Prinsip sederhana

acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Para pihak orang mengajukan perkara, prinsipnya ingin cepat selesai. Itu sejalan dengan asas peradilan yang menggariskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Sidang Keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Bale Bandung, sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Sidang keliling terus dilakukan, meskipun belum ada pedoman yang dibukukan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti sekarang ini. Karena belum memiliki Pengadilan Agama, aparat peradilan berusaha untuk membuka akses keadilan terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan untuk mempermudah jangkauan pelayanan bagi masyarakat. Keadilan tidak hanya milik orang yang mempunyai uang saja, karena

jarak yang jauh tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya menetapkan dua Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara dimana majelis satu sidang hari Selasa dan majelis dua sidang hari Kamis. Tiap Majelis mengalami sidang dua kali dalam satu bulan, karena sidangnya per dua pekan sekali dengan begitu berarti terdapat empat kali sidang dalam waktu satu bulan.

Selain sidang, dalam rombongan Sidang Keliling juga ada dua orang petugas Meja I yang bertugas menerima perkara. Sekarang ini, masyarakat kabupaten Tasikmalaya tidak perlu datang ke gedung pengadilan Semua urusan perkaranya bisa diselesaikan di tempat Sidang Keliling. Mulai dari pendaftaran perkara, sidang, pengambilan uang sisa panjar sampai pengambilan salinan penetapan/putusan, termasuk akta cerai untuk perkara perceraian.

Menurut Pasal 6 Perma No.1 tahun 2015, Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Jadi, sidang keliling itu merupakan salah satu bentuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang khusus untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Hal ini dapat mempercepat jalanya persidangan sampai mencapai putusan

3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan<sup>12</sup>.

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya kembali melakukan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu di wilayah cipatujah, wanonjaya dan sekitarnya yakni pelaksanaan sidang keliling dan layanan perkara prodeo untuk perkara itsbath Nikah. Pelaksanaan sidang keliling dan layanan perkara prodeo dilakukan di kantor desa

Tujuan adanya pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah :



1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya

Agar lebih tercapai tujuan pemberian hukum diatas maka Pengadilan Agama mengadakan pelayanan terpadu sidang keliling yang diatur dalam Pasal 2 Perma No 1 Tahun 2015, Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan Terpadu sidang keliling bertujuan untuk

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan diadakannya Perma no 1 Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran
- b. Bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Lebih lanjut Pasal 3 ayat Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau (1) Perma No. 1 Tahun 2015, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/

Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.

Dari tujuan tersebut dapat dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advise hukum maupun pembuatan gugatan

Jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo dari tahun ke tahun terus meningkat, penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling di pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari suksesnya penyerapan anggaran pada tahun ini. Hanya saja banyak sekali perkara prodeo yang berupa perkara voluntair yang sederhana, yang biaya prosesnya di bawah Rp 300.000, maka sudah pasti sisa anggaran yang dikembalikan ke negara pun akan besar sekali, walaupun targetnya terpenuhi.

"Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya fasilitas prodeo di pengadilan agama. Hal ini dijadikan materi sosialisasi di sela-sela sidang keliling oleh pimpinan dan aparat pengadilan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dirjen Badilag terdahulu bahwa pengadilan tidak boleh mencari perkara. Namun, jika mempunyai anggaran prodeo, sebaiknya pengadilan menyosialisasikannya kepada pihak dan tokoh-tokoh terkait sesuai dengan ketentuan dan kepatutan. Siapa tahu banyak masyarakat miskin di wilayahnya yang memerlukan. Selain alasan di atas, mungkin masih ada alasan lainnya, misalnya karena budaya masyarakat yang tidak mau disebut miskin walau dalam kenyataannya kurang mampu.

Terlepas dari itu semua, karena sudah menjadi program dan tercantum dalam RKAKL, layanan prodeo harus dilaksanakan. Anggaran yang ada perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

### **III. Penutup**

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di lingkungan pengadilan tinggi agama Jawa Barat, khususnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memenuhi prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sidang keliling terbukti mampu membuka akses keadilan secara lebih luas kepada masyarakat. Di antaranya ketika masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya, pihak pengadilan datang langsung ke lokasi dengan pemeriksaan lebih sederhana, dalam hal ini

pelaksanaan sidang harus selesai paling lama dalam empat kali sidang.

Meskipun pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana, adanya sistem kontrol yang efektif dari ber-bagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat dan mekanisme pelibatan parti-sipasi masyarakat secara aktif mampu menjaga kualitas pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling di antaranya belum ada pedoman pelaksanaan sidang keliling yang baku, tidak semua jenis perkara yang didaftarkan warga dapat diperiksa di sidang keliling, anggaran yang terbatas, perkara yang disidangkan belum semuanya pro deo, sarana dan prasarana penyelenggaraan sidang keliling dan tidak semua pengadilan agama mengadakan sidang keliling

### Daftar Pustaka

#### Buku-buku

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Krisna harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2007
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- M. Saleh dan lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni Bandung, 2012
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Perma No.1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran

#### Sumber Hukum Lain

- Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin,SH, PP-IKAHA, Jakarta, 1994